

BAB IV

ANALISIS FRAMING TERHADAP BASUKI TJAHAJA PURNAMA PASCA PILKADADKI JAKARTA PUTARAN PERTAMA 2017 PADA MEDIA TEMPO.CO DAN REPUBLIKA.CO.ID

Pemberitaan mengenai Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjadi pemberitaan yang menarik perhatian bagi khalayak. Hal ini tidak lain terkait pencalonan diri kembali sebagai bakal calon Gubernur DKI Jakarta serta kasus dugaan penistaan agama yang menjerat Ahok. Tidak sedikit juga media yang turut ikut serta memberitakan Ahok secara gencar, baik dari sisi kepemimpinan maupun kasus yang dialami. Untuk itu peneliti melakukan penelitian mengenai fenomena tersebut.

Media memang sejatinya berperan sebagai pemberi informasi kepada khalayak, tetapi dalam prakteknya penyebaran informasi yang disajikan oleh media tidak memberikan informasi yang selengkap-lengkapnyanya. Ada salah satu sisi yang ditonjolkan dan sisi lain yang dihilangkan. Media justru berperan dalam mengkonstruksikan realitas sedemikian rupa. Ada peristiwa yang dimaknai sedemikian rupa, ada yang menganggap itu penting, ada yang menganggap itu bukan sebagai berita. Semua kenyataan tersebut memperlihatkan bahwa media subjektif dalam memberitakan berita. (Eriyanto, 2012: 2)

Alasan media untuk berlaku subyektif tidak dapat terlepas dari beragam factor baik dari luar maupun dalam media itu sendiri. Faktor-faktor yang menyangkut subyektifitas media, contohnya seperti adanya kepentingan pemilik

media, kepentingan sebagai lembaga ekonomi, subjektivitas wartawan di dalam menyajikan berita, serta landasan atau ideologi yang dibawa oleh media tersebut. Subjektivitas yang dilakukan oleh media di dalam menyajikan sebuah berita, memberikan masyarakat tentang gambaran yang dianggap sebuah realitas dari peristiwa dalam sudut pandang media. Tentu saja hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa, realitas yang disajikan oleh media tersebut bukanlah realitas yang sesungguhnya. Realitas yang disajikan oleh media tersebut tidak lain merupakan realitas yang dibentuk kembali oleh media tersebut sehingga menimbulkan opini tertentu. Opini tertentu yang dimunculkan dari pemberitaan media tersebut dapat menimbulkan persepsi tersendiri yang berbeda-beda oleh pembaca, sehingga pembaca terpengaruh oleh realitas yang dibentuk media. Keadaan inilah yang disebut sebagai pembingkaiannya yang dilakukan oleh media.

Pembingkaiannya yang dilakukan oleh media ini terjadi pada semua lini kehidupan, tidak terkecuali dalam pemberitaan mengenai Ahok pasca Pilkada DKI Jakarta putaran pertama 2017. Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 menjadi perhatian bagi beberapa media di Indonesia, termasuk Tempo dan Republika. Bagi media, termasuk Tempo dan Republika, Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 merupakan sebuah momen yang dapat mengundang dan menarik perhatian khalayak. Istilah yang biasa digunakan oleh media di dalam penyebutan tentang permasalahan politik yaitu *“political warm is newsworthiness”*. Dengan adanya keadaan inilah yang dinilai mampu menambah minat dari media-media untuk lebih banyak mengangkat isu-isu pemerintahan dan politik.

Tempo dan Republika merupakan dua media besar yang vokal dalam menyajikan pemberitaan mengenai isu-isu di Pilkada DKI Jakarta 2017. Selama periode Februari hingga April 2017, banyak sekali berita yang disajikan oleh kedua media. Hingga lebih dari 100 berita yang disajikan di masing masing media yang membahas mengenai Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Hal tersebut menjadi bukti bahwa isu yang memnyangkut Ahok dalam Pilkada 2017 memiliki daya tarik tersendiri bagi media untuk membahasnya. Akan tetapi dari banyaknya pemberitaan mengenai Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 tersebut, di dalam penelitian ini, peneliti menghadirkan 20 berita yang memiliki topik pemberitaan yang sama di antara kedua media tersebut.

Penelitian dilakukan dalam jangka waktu dua bulan, dari tanggal 18 Februari hingga 13 April 2017. Selama kurun waktu tersebut diambil jumlah berita dengan topik pemberitaan yang sama dari kedua media tersebut. Masing-masing diambil 20 pemberitaan dari Tempo dan Republika. Pada bab ini akan dipaparkan mengenai perbandingan frame dari kedua media tersebut dalam pemberitaan Ahok. Peneliti menggunakan perangkat framing dari Robert N. Entman untuk mengetahui kebijakan redaksional seperti apa yang dipilih oleh Tempo dan Republika dalam melakukan pemberitaan mengenai Basuki Tjahaja Purnama paska Pilkada putaran pertama DKI Jakarta 2017 dilaksanakan.

Melalui perangkat framing dari Robert N. Entman, dapat digambarkan mengenai proses seleksi isu dan penonjolan aspek tertentu dari realitas oleh media. Pada dasarnya, konsepsi Entman merujuk pada pendefinisian masalah (*define problems*), memperkirakan masalah (*diagnose cause*), membuat keputusan

moral (*make moral judgement*), dan menekankan penyelesaian (*treatment recommendation*) dalam suatu wacana untuk menekankan kerangka berpikir atau sikap tertentu terhadap peristiwa yang diwacanakan (Eriyanto, 2012: 188).

Ada empat perangkat framing yang dikembangkan oleh Robert N. Entman, yaitu antara lain;

a) *Define problem*

Pendefinisian masalah merupakan elemen yang pertama kali dapat digunakan melihat framing. Elemen ini merupakan bingkai paling utama. Ia menekankan bagaimana peristiwa dipahami wartawan. Ketika terdapat masalah atau peristiwa, bagaimana peristiwa atau isu tersebut dipahami. Satu peristiwa dapat dipahami secara berbeda. Bingkai berbeda ini akan menyebabkan pembentukan realitas yang berbeda.

b) *Diagnose causes*

Memperkirakan penyebab masalah merupakan elemen framing untuk membingkai siapa yang dianggap sebagai aktor suatu peristiwa. Penyebab di sini dapat dikategorikan ke dalam siapa (*who*) dan apa (*what*). Bagaimana sebuah peristiwa dipahami, tentu saja akan berakhir pada siapa atau apa yang dianggap menjadi sumber dari masalah. Dengan masalah yang dipahami secara berbeda, maka penyebab dari masalah tersebut juga secara tidak langsung akan dipahami secara berbeda.

c) *Make moral judgement*

Membuat pilihan moral adalah elemen framing yang dipakai untuk membenarkan atau memberi argumentasi pada pendefinisian masalah yang sudah dibuat. Entman menganggap, ketika masalah telah didefinisikan, penyebab masalah sudah ditentukan, dibutuhkan argumentasi kuat guna mendukung gagasan tersebut. Gagasan yang dikutip berhubungan dengan sesuatu yang familiar dan telah dikenal khalayak.

d) *Treatment recommendation*

Menekankan penyelesaian merupakan elemen yang dipakai untuk menilai apa yang dikehendaki wartawan. Jalan apa yang dipilih untuk menyelesaikan masalah. Penyelesaian itu tergantung pada bagaimana peristiwa itu dilihat dan siapa yang dipandang sebagai penyebab masalah.

Entman melihat framing dalam dua dimensi besar, yaitu seleksi isu dan penonjolan atau penekanan aspek tertentu. Seleksi isu adalah memilih mana informasi yang akan ditampilkan mana yang akan dibuang. Sedangkan penonjolan adalah proses membuat informasi menjadi lebih bermakna, menarik, berarti dan diminati oleh pembaca.

4.1. Frame Tempo Terhadap Basuki Tjahaja Purnama Paska Pilkada DKI Jakarta Putaran Pertama 2017

Selama masa setelah pilkada DKI Jakarta putaran pertama 2017, Tempo memuat beberapa pemberitaan mengenai Ahok. Dari beberapa pemberitaan tersebut dipilih 20 pemberitaan yang menurut peneliti relevan untuk dibandingkan dengan pemberitaan yang dilakukan oleh media lainnya. Peneliti melakukan penelitian mengenai pemberitaan Basuki Tjahaja Purnama paska Pilkada putaran pertama periode pemberitaan 18 Februari – 13 April 2017. Dengan menggunakan perangkat framing Entman, akan digunakan untuk mengetahui bagaimana kebijakan Tempo dalam pemberitaan terkait Ahok pada masa pemberitaan tersebut.

Problem identification atau pengidentifikasian masalah dalam pemberitaan Basuki Tjahaja Purnama paska Pilkada putaran pertama DKI Jakarta 2017 dari masing-masing pemberitaan yang dilakukan oleh Tempo dan Republika. Berdasarkan *problem identification* terhadap berita yang telah disajikan, Tempo dan Republika memiliki banyak kecenderungan yang berbeda di dalam menyajikan berita pada masing-masing media mereka. Hal ini dapat dipengaruhi oleh beragam faktor seperti opini wartawan, kepentingan di balik media tersebut, visi dan misi, kebijakan redaksional dari media tersebut dan lain sebagainya.

Pemberitaan yang dilakukan oleh Tempo mengenai Basuki Tjahaja Purnama yang dipilih dalam penelitian adalah sebanyak 20 berita. Dari berita-berita tersebut terdapat 8 berita yang membahas mengenai kegiatan dan kebijakan yang dilakukan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kemudian 9 berita yang

membahas terkait kasus dugaan penodaan yang dilakukan oleh Ahok. Dan terdapat 3 berita yang membahas persiapan Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta putaran kedua.

Melalui 20 berita tersebut disini terlihat bagaimana Tempo menyajikan pemberitaan mengenai Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pada sisi yang tidak mendukung satu sisi tertentu. Tempo lebih menekankan dalam memberikan informasi yang sebenarnya kepada masyarakat luas. Melalui pemberitaan-pemberitaan ini Tempo seakan-akan mengutarakan seperti apa sosok Ahok yang selama ini belum banyak diketahui oleh masyarakat. Selain pada kasus yang menjerat Ahok, Tempo juga menyajikan berita yang diambil dari sudut pandang sisi Ahok. Kegiatan dan kebijakan yang dilakukan oleh Ahok sebagai Gubernur yang melayani warga Jakarta serta kesiapan Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 putaran kedua.

Pada berita yang disajikan oleh Tempo, Tempo memiliki kecenderungan untuk bersikap netral dan independen sesuai dengan amanat yang diembannya. Tempo tidak memihak terhadap kasus dan pemberitaan tentang kontroversi yang terjadi kepada Ahok.

Pada salah satu berita yang dimuat Tempo berjudul “Banjir Bukit Duri, Ahok: Saya Lagi Cari Jalan Tengah” yang diberitakan pada 20 Februari 2017. Pada pemberitaan tersebut pengidentifikasian masalah versi Tempo ialah, untuk mengurangi banjir yang melanda ibu kota setiap tahun, normalisasi daerah pinggiran sungai perlu dilakukan. Namun dengan adanya kondisi normalisasi daerah pinggiran sungai baru dapat dilakukan, bila rumah susun sudah dibangun

bagi penduduk yang menjalani relokasi dari lokasi banjir. Pemerintah provinsi DKI Jakarta diharapkan mampu memberikan solusi yang terbaik. Meskipun pemerintah provinsi DKI Jakarta masih dihadapkan pada masalah pembebasan lahan sekitar sungai Ciliwung.

Tempo memberikan penekan pada apa yang sebenarnya terjadi di kawasan Bukit Duri. Selain itu Tempo juga menggambarkan bagaimana masalah banjir tersebut berimbas pada masyarakat yang tinggal di lokasi banjir. Lalu, lebih lanjut mengenai rencana yang akan dilakukan Ahok untuk mengatasi masalah banjir di DKI Jakarta tersebut. Tempo memberikan gambaran yang netral mengenai situasi banjir sebenarnya yang terjadi di masyarakat. Tempo tidak melakukan pemberitaan yang berlebihan terkait Ahok, hanya sebatas penyampaian informasi yang penting dan diperlukan oleh masyarakat luas.

Causal interpretation atau memperkirakan penyebab masalah. Dalam melakukan pemberitaan terhadap Ahok, Tempo banyak mengangkat topik yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat secara umum. Serta Tempo menghindari mengangkat pemberitaan yang mampu menimbulkan opini di dalam masyarakat, untuk memihak pada sisi tertentu. Tempo semaksimal mungkin berusaha memberikan pemberitaan yang netral dan independen sesuai dengan semboyan yang dipegang oleh Tempo.

Terdapat sebanyak 20 berita yang diambil oleh peneliti dalam perbandingan ini. Dari berita-berita tersebut terdapat 3 berita yang membahas mengenai bencana alam yang terjadi di Jakarta, dan bagaimana langkah penanganan yang dilakukan oleh Ahok untuk menanggulangi bencana tersebut.

Kemudian 8 berita yang membahas terkait kasus pihak-pihak yang kontra terhadap Ahok, serta pemberitaan yang cenderung negatif terhadap Ahok. Dan terdapat 9 berita yang membahas secara positif terhadap Ahok dalam kegiatannya maupun kebijakannya.

Disini tampak bagaimana Tempo berusaha memberikan pemberitaan yang berimbang, dengan mengangkat pemberitaan baik yang positif maupun negatif terhadap Ahok. Dari segi jumlah, pemberitaan yang dilakukan Tempo juga tidak jauh berbeda, jumlah kedua berita tersebut hampir sama. Hal ini menggambarkan bagaimana kebijakan Tempo untuk mengedepankan aspek netral dan pemberitaan yang berimbang antar kedua sisi. Tempo cenderung untuk memilih pemberitaan yang dinilai cukup untuk memberikan gambaran seperti apa peristiwa yang terjadi, dalam sisi positif dan negatif. Sehingga masyarakat mampu menilai dan menelaah secara mandiri seperti apa peristiwa tersebut terjadi, dan dipandang dari dua sisi yang berbeda.

Seperti pada salah satu berita yang dimuat oleh Tempo, mengenai diadikannya Ananta Amir oleh tim kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama membuat JPU keberatan. Jaksa Penuntut Umum keberatan karena Ananta yang merupakan kakak angkat Ahok pernah hadir ketika ada pemeriksaan saksi di persidangan kasus dugaan penistaan agama. Sesuai peraturan saksi tidak boleh saling berhubungan dengan saksi lainnya. Selain itu, JPU khawatir akan ada cacat hukum apabila persidangan terus dilanjutkan dengan diterimanya Ananta. Dalam pemberitaan tersebut Tempo mengangkat pemberitaan yang memberikan citra negatif terhadap Ahok. Sedangkan dalam pemberitaan lainnya

mengenai presiden Afrika Selatan Jacob Zuma datang ke Indonesia bersama rombongan delegasi kenegaraannya. Dalam kunjungannya kerumah Megawati Soekarno Putri, Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat hadir untuk ikut menyambut Jacob Zuma. Tempo mengangkat pemberitaan yang memberikan citra positif terhadap Ahok. Dari kedua contoh berita tersebut dapat disimpulkan bahwa, Tempo telah berusaha memberikan pemberitaan yang berimbang dalam pemberitaan terkait Ahok.

Moral evaluation atau evaluasi moral. Dalam pemberitaan terkait Ahok paska pilkada putaran pertama DKI Jakarta 2017, terdapat empat evaluasi moral yang diberikan oleh Tempo dalam pemberitan terkait Ahok.

Pertama, tugas seorang pemimpin adalah untuk mengabdikan untuk rakyatnya, sehingga harus mampu cepat dan tanggap dalam mengatasi setiap permasalahan dan peristiwa yang terjadi di daerahhnya. Serta mengutamakan kepentingan masyarakat sebagai acuan yang utama untuk dilakukan. Keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas yang utama dalam menentukan kebijakan. Terlepas dari sosok tersebut sedang menjalani pemeriksaan atau terjerat dalam sebuah kasus, tugas seorang pemimpin tidak dapat diabaikan begitu saja.

Kedua, bahwa melalui sepatah atau dua patah kata saja yang memiliki makna negatif, mampu membuat seseorang kehilangan citra positif dan dicap dalam masyarakat. Bahkan bisa saja sampai terjerat kasus hukum yang serius dan bisa diadili, bahkan menjadi tersangka atas kasus tersebut.

Ketiga, pihak yang menjadi tokoh utama saat ini, bisa saja nantinya menjadi pihak figuran dan diabaikan. Untuk itu setiap tindakan yang dilakukan akan menuai hasil yang sesuai. Oleh karena itu, menjaga sikap dan memilih perilaku yang tepat memang harus dilakukan. Selain untuk menjamin hasil yang baik, hal tersebut juga bertujuan untuk turut memberikan hasil yang baik bagi orang sekitarnya. Apalagi sebagai seorang tokoh penting bahkan seorang pemimpin, sudah pasti memerlukan pertimbangan yang cukup dalam untuk mengambil keputusan atas sebuah tindakan.

Terakhir, terlepas dari siapa saja yang akan menjadi pemimpin atau bahkan pengabdikan untuk masyarakat. Sudah seharusnya sosok tersebut menjadikan kepentingan rakyat sebagai kepentingan yang utama. Untuk itu sudah sewajarnya untuk membawa kebaikan dan kesejahteraan kepada masyarakat yang dipimpin olehnya.

Treatment recommendation atau menentukan penyelesaian. Tempo memberikan lima rekomendasi yang bisa dilakukan terkait pemberitaan mengenai Ahok.

Pertama, pemerintah harus tanggap dan cepat dalam mengambil kebijakan pada peristiwa yang terjadi. Sehingga masyarakat tidak menjadi korban yang terabaikan. Ambil keputusan yang terbaik untuk mencegah sebuah peristiwa buruk terulang kembali di masa mendatang. Untuk itu langkah yang tanggap, cepat, dan efisien sangat diperlukan untuk mengatasi sebuah peristiwa yang terjadi di masyarakat.

Kedua, lebih bijaksana untuk menilai sebuah peristiwa. Dengan cara memahami peristiwa tersebut secara lengkap dan mendetail. Sehingga tidak menimbulkan pemahaman yang keliru dari sebuah peristiwa. Karena jika sampai keliru memahami akan menyebabkan banyak hal yang kurang baik kedepannya, baik secara jangka pendek maupun jangka panjang.

Ketiga, menjadi figur publik berarti haruslah mampu berpikir secara matang dan memandang konsekuensi dari perilaku yang dilakukan. Untuk itu karena Indonesia merupakan negara hukum, sudah seharusnya untuk menyerahkan semua peristiwa yang dianggap melanggar hukum, untuk diproses secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti apapun hasilnya, sudah sewajarnya dihormati karena hal tersebut merupakan hasil dari proses hukum yang telah dilakukan.

Keempat, dalam memberikan keterangan atau kesaksian pada peradilan proses hukum yang sedang berjalan, harus dan mutlak bagi saksi untuk memberikan keterangan yang netral. Serta berusaha untuk seobjektif mungkin dalam memberikan keterangan. Karena apa saja keterangan yang diberikan akan mempengaruhi hasil dari proses hukum yang berjalan. Baik itu pernyataan yang meringankan maupun memberatkan kepada terdakwa, tetap utamakan untuk memberikan pernyataan yang netral.

Terakhir, terlepas dari semua hal yang mempengaruhinya. Sudah menjadi kewajiban bagi pemimpin untuk membuat kebijakan yang mengutamakan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kesejahteraan masyarakat harus tetap dilakukan. Bukan hanya pada sebagian masyarakat yang

mendukung saja, tetapi juga harus kepada semua elemen masyarakat. Karena masyarakat adalah aspek utama dan tujuan utama dari kebijakan yang dibuat serta diterapkan oleh pemimpin.

Tempo dalam setiap pemberitaanya selalu menggunakan pemilihan bahasa yang lugas, terang dan langsung dalam pemberitaan terkait Ahok paska pilkada putaran pertama DKI Jakarta. Tempo sangat jarang menggunakan bahasa yang bertele-tele atau berputar-putar dalam menyampaikan pemberitaanya. Serta dalam setiap pemberitaan tersebut Tempo juga mengutamakan pemberitaan yang netral dan independen. Hal ini sesuai dengan misi dari Tempo yang memberikan berita secara independen kepada masyarakat. Tempo memberikan pemberitaan yang berimbang dengan mengangkat semua aspek baik yang pro maupun kontra terhadap Ahok. Bahkan tidak jarang Tempo juga mengangkat berita dengan perspektif yang lain dari kasus Ahok tersebut.

4.2. Frame Republika Terhadap Basuki Tjahaja Purnama Paska Pilkada DKI Jakarta Putaran Pertama 2017

Selanjutnya ialah melalui sisi Republika, serupa dengan Tempo, namun memiliki beberapa segi penegasan. Dari 20 berita yang diambil untuk diteliti terdapat 8 berita yang membahas mengenai kegiatan dan kebijakan yang dilakukan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kemudian 9 berita yang membahas terkait kasus dugaan penodaan yang dilakukan oleh Ahok. Dan terdapat 3 berita yang membahas persiapan Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta putaran kedua.

Problem identification atau pendefinisian masalah. Dalam pemberitaan terkait Ahok paska pilkada putaran pertama DKI Jakarta 2017, peneliti mengambil pemberitaan dari Republika sejumlah 20 berita yang memiliki tema yang sama dengan pemberitaan yang dilakukan oleh Tempo. Dari 20 berita yang diambil untuk diteliti terdapat 8 berita yang membahas mengenai kegiatan dan kebijakan yang dilakukan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kemudian 9 berita yang membahas terkait kasus dugaan penodaan yang dilakukan oleh Ahok. Dan terdapat 3 berita yang membahas persiapan Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta putaran kedua.

Melalui analisi pemberitaan yang dilakukan oleh Republika terlihat disini meskipun serupa dengan Tempo, namun Republika memiliki penegasan dalam beberapa segi. Seperti dalam pemberitaan yang dilakukan oleh Republika, Ahok dianggap kurang bijak karena telah melakukan penistan agama Islam, sikap Ahok yang kurang tepat dalam menangani banjir, dan sebagainya. Melalui hal tersebut dapat dilihat bahwa Republika memang menyajikan berita yang lebih mengutamakan kepentingan Islami. Republika memiliki kecenderungan mendukung terhadap penetapan Ahok sebagai tersangka dan mengecam tindakan Ahok yang dinilai telah menistakan agama Islam.

Pada salah satu pemberitaan dari Republika berjudul “Ahok Kunjungi Daerah Banjir, Ini yang Dikatakannya” yang diberitakan pada 20 Februari 2017. Pengidentifikasi masalah versi Republika ialah, bahwa untuk melakukan normalisasi sungai pemerintah provinsi DKI Jakarta, melalui Ahok memastikan

akan membongkar rumah-rumah yang berada di sekitar sungai Ciliwung. Untuk itu warga yang tinggal di daerah sekitar sungai harus dipindahkan.

Republika memberitakan mengenai tindakan apa yang akan dilakukan oleh Ahok untuk mengatasi banjir. Tindakan yang akan diambil adalah dengan melakukan pengusuran terhadap rumah-rumah yang dibangun di sekitar aliran sungai Ciliwung. Lalu, warga diperintahkan untuk pindah dari pemukiman tempat tinggal mereka. Melalui penggambaran masalah ini, Republika menggambarkan bahwa tindakan yang dilakukan adalah tindakan yang tidak pro terhadap semua kalangan masyarakat. Bukti dari hal tersebut ialah pengusuran terhadap warga Jakarta yang tinggal di sekitar aliran sungai. Republika menilai melakukan pengusuran secara sepihak bukanlah cara yang terbaik untuk memecahkan masalah banjir di Jakarta. Karena nasib warga yang menjadi korban pengusuran juga akan menjadi pertanyaan selanjutnya.

Casual interpretation atau memperkirakan penyebab masalah. Dalam melakukan pemberitaan terkait Ahok pasca pilkada putaran pertama DKI Jakarta 2017, Republika beberapa kali cenderung mengangkat berita yang memiliki citra negatif terhadap Ahok. Bahkan dalam beberapa berita Republika mengangkat berita yang tegas menilai Ahok bersalah karena melakukan tindakan penistaan agama.

Tercatat dari 20 pemberitaan yang dimuat oleh Republika, didominasi oleh pemberitaan yang cenderung memiliki citra yang negatif terhadap pihak Ahok. Diantaranya adalah 1 pemberitaan terkait bencana yang terjadi di Jakarta, lalu terdapat juga 2 pemberitaan dengan topik pihak yang kontra terhadap Ahok.

Selanjutnya terdapat 7 pemberitaan yang mengulas pihak Ahok secara positif. Dan terakhir terdapat 10 pemberitaan yang memiliki citra negatif terhadap Ahok.

Melalui data diatas terlihat bahwa Republika cenderung mengambil sikap yang tegas dalam melakukan pemberitaan terhadap Ahok. Republika yang dalam setiap pemberitaanya dinilai mengutamakan kepentingan umat islam, memberikan pemberitaan-pembertitaan yang tegas terhadap Ahok yang dinilai telah menistakan agama islam melalui pidatonya. Ahok yang dianggap sebagai pihak yang bersalah mendapat respon dan kritik yang keras oleh Republika melalui pemberitaan-pemberitaan yang dimuat Republika. Lebih jauh Republika mengisyaratkan bahwa Ahok seharusnya bertanggung jawab atas tindakan penistaan agama yang telah dilakukannya. Dalam pemilihan narasumber, Republika juga beberapa kali mengangkat pemberitaan yang berasal dari narasumber yang kontra terhadap Ahok maupun kebijakan yang dilakukan oleh Ahok. Meskipun demikian, dalam beberapa pemberitaan Republika juga memuat berita yang positif terhadap Ahok. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi salah satu untuk jurnalistik, yaitu pemberitaan yang berimbang. Meskipun pada akhirnya terdapat jumlah pemberitaan yang cukup berbeda antara yang positif dan negatif terhadap Ahok.

Moral evaluation atau evaluasi moral. Dalam pemberitaan terkait Ahok paska pilkada putaran pertama DKI Jakarta 2017, terdapat tiga evaluasi moral yang diberikan oleh Republika dalam pemberitan terkait Ahok.

Pertama, pemerintah provinsi (pemprov) seharusnya membuat program yang mampu menggapai semua elemen masyarakat. Bahkan termasuk juga

elemen masyarakat yang paling dasar atau bawah. Sehingga nantinya program yang dibuat tersebut mampu memberikan hasil yang baik bagi semua pihak. Baik itu pihak yang membuat kebijakan maupun pihak yang menjadi tujuan dari adanya kebijakan tersebut. Karena dasar dari dibuatnya sebuah kebijakan tidak lain adalah untuk mensejahterakan masyarakat umum.

Kedua, semua pihak termasuk seorang pemimpin sekalipun tidak lepas dari tanggung jawab. Untuk itu sudah sewajarnya bila seseorang harus bertanggung jawab atas tindakan yang telah dilakukannya. Apalagi bila tindakan tersebut mampu memberikan dampak yang luas di dalam masyarakat. Semua tindakan, baik itu positif maupun negative yang dilakukan oleh pihak tertentu, maka pihak tersebut harus mampu serta mau mempertanggung jawabkan hasil dari tindakannya tersebut.

Terakhir, menjadi tokoh yang penting di dalam masyarakat bukanlah sebuah hal yang mudah untuk dilakukan. Untuk itu, maka seorang tokoh yang penting di dalam masyarakat sepantasnya menjaga sikap agar mampu memberikan contoh dan menjadi tauladan yang baik bagi masyarakat. Tutur kata, perilaku, serta sikap yang akan dilakukan seharusnya lebih baik bila dipertimbangkan secara matang sebelum dipilih untuk dilakukan. Karena jika saja telah keliru memilih sikap untuk dilakukan maka tidak menutup kemungkinan akan memberikan dampak yang negative yang buruk, baik itu kepada sosok itu sendiri maupun masyarakat.

Treatment recommendation atau menentukan penyelesaian. Republika memberikan tiga rekomendasi yang bisa dilakukan terkait pemberitaan mengenai Ahok.

Pertama, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah haruslah mampu menjangkau segala elemen yang ada di dalam masyarakat. Setiap elemen yang ada di dalam masyarakat harus bisa merasakan manfaat dari dibuatnya sebuah kebijakan tersebut. Segala elemen sampai elemen yang paling mendasar dalam masyarakat juga dipikirkan dalam membuat kebijakan. Karena sekarang ini, tidak jarang kebijakan dari pemerintah dibuat hanya untuk kepentingan segelintir elemen bahkan golongan saja. Sehingga manfaatnya tidak bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Oleh karena itu sudah sepantasnya dalam membuat kebijakan juga harus melihat semua elemen masyarakat yang ada, sampai elemen masyarakat yang paling mendasar. Tujuannya adalah agar manfaat dari kebijakan tersebut bisa membawa kebaikan bagi seluruh elemen yang ada dan masyarakat secara luas.

Kedua, sebuah peristiwa yang terjadi bisa dipastikan akan ada sebab dan akibatnya. Oleh karena itu apa yang menjadi penyebab dari sebuah peristiwa harus bisa dipastikan, dan selanjutnya baru bagaimana menangani akibat dari peristiwa tersebut. Seperti kegaduhan politik yang terjadi di Jakarta disebabkan oleh perilaku Ahok yang melakukan penistaan agama. Hal ini menjadi wajar jika Ahok harus bertanggung jawab atas tindakannya, dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Karena secara tidak langsung tindakan yang dilakukan

oleh Ahok telah merugikan banyak pihak, serta membuat pihak-pihak saling berselisih.

Terakhir, kebiasaan Ahok untuk berbicara secara spontan mengenai hal apa yang terlintas dibenaknya adalah hal yang riskan untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan Ahok sebagai sosok seorang pemimpin tentu harus berpikir secara matang sebelum melontarkan sebuah pernyataan. Memang bagus jika berbicara secara apa adanya dan benar, namun tentu saja harus dibarengi dengan pemikiran efek seperti apa yang bisa saja dibawa oleh pernyataan tersebut. Serta bagaimana sudut pandang yang lain dalam menangkap pernyataan tersebut juga harus dipikirkan. Karena sebagai sosok yang penting tentu saja pernyataan yang dilontarkan akan mendapatkan respon yang beragam dari banyak pihak. Respon yang diberikan pun sudah pasti akan beragam, mulai dari yang pro terhadap pernyataan tersebut sampai pada yang kontra bahkan menganggap pernyataan tersebut merendahkan dan bermasalah. Untuk itu sudah seharusnya sebagai sosok yang penting, untuk lebih berpikir matang sebelum memberikan pernyataan. Bukan hanya sebatas pernyataan hasil dari pemikiran yang spontan yang terlintas saja.

Republika menyampaikan pemberitaan secara berimbang terkait pemberitaan terhadap Ahok paska pilkada putaran pertama DKI Jakarta. Meskipun dalam pemberitaan yang diangkat Republika cenderung memberitakan sisi yang kontra Ahok secara lebih banyak dibandingkan dengan pro terhadap Ahok. Republika cenderung memberikan berita yang lebih islami atau mengutamakan kepentingan umat islam dalam setiap pemberitaanya. Hal ini

sesuai dengan misi Republika yang ingin memberikan berita dari sisi islami yang mengutamakan kepentingan umat islam. Republika lebih sering mengangkat berita dalam pandangan islami atau tokoh islam dalam menanggapi kasus yang menyangkut Ahok tersebut.

4.3. Perbandingan Frame Tempo dan Republika Terhadap Basuki Tjahaja Purnama Paska Pilkada DKI Jakarta Putaran Pertama 2017

Seperti yang telah diuraikan diatas mengenai pemberitaan terhadap Ahok paska pilkada putaran pertama DKI Jakarta 2017, banyak media yang memberitakan hal tersebut secara gencar, tak terkecuali Tempo dan Republika. Dari masing-masing media mempunyai sudut pandang tersendiri dalam memberikatakan hal tersebut. Tempo dengan sisi netral dan independen yang selalu diembannya, dan Republika dengan sisi islami yang mengutamakan kepentingan umat islam dalam pemberitaanya. Kedua media ini memiliki ketertarikan tersendiri dalam kasus Ahok, untuk itu pemberitaan yang diangkat pun belum tentu sama dari kedua media tersebut.

Kedua media masing-masing menurunkan lebih dari 80 berita terkait Ahok, namun peneliti mengambil 20 berita dari masing-masing media yang memiliki tema serupa. Bagaimana pembahasan mengenai perbandingan frame Tempo dan Republika. Berikut analisis perbandingan frame dari masing-masing media dengan menggunakan perangkat framing dari Robert N. Entman.

Tabel 4.1
Perbandingan *Problem Identification* Tempo dan Republika

Media Massa	<i>Problem Identification</i>
Tempo	Tempo lebih menekankan dalam memberikan informasi yang sebenarnya kepada masyarakat luas. Melalui pemberitaan-pemberitaan ini Tempo seakan-akan mengutarakan seperti apa sosok Ahok yang selama ini belum banyak diketahui oleh masyarakat. Selain pada kasus yang menjerat Ahok, Tempo juga menyajikan berita yang diambil dari sudut pandang sisi Ahok. Kegiatan dan kebijakan yang dilakukan oleh Ahok sebagai Gubernur yang melayani warga Jakarta serta kesiapan Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 putaran kedua.
Republika	Republika memiliki penegasan dalam beberapa segi. Seperti dalam pemberitaan yang dilakukan oleh Republika, Ahok dianggap kurang bijak karena telah melakukan penistan agama Islam, sikap Ahok yang kurang tepat dalam menangani banjir, dan sebagainya. Melalui hal tersebut dapat dilihat bahwa Republika memang menyajikan berita yang lebih mengutamakan kepentingan Islami. Republika memiliki kecenderungan mendukung terhadap penetapan Ahok sebagai tersangka dan mengecam tindakan Ahok yang dinilai telah menistakan agama Islam.

Tabel 4.2
Perbandingan *Casual Interpretation* Tempo dan Republika

Media Massa	<i>Casual Interpretation</i>
Tempo	Tempo banyak mengangkat topik yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat secara umum. Serta Tempo menghindari mengangkat pemberitaan yang mampu menimbulkan opini di dalam masyarakat, untuk memihak pada sisi tertentu. Tempo semaksimal mungkin berusaha memberikan pemberitaan yang netral dan independen sesuai dengan semboyan yang dipegang oleh Tempo.
Republika	Republika cenderung mengambil sikap yang tegas dalam melakukan pemberitaan terhadap Ahok. Republika yang dalam setiap pemberitaanya dinilai mengutamakan kepentingan umat islam, memberikan pemberitaan-pembertitaan yang tegas terhadap Ahok yang dinilai telah menistakan agama islam melalui pidatonya. Ahok yang dianggap sebagai pihak yang bersalah mendapat respon dan kritik yang keras oleh Republika melalui pemberitaan-pemberitaan yang dimuat Republika.

Tabel 4.3
Perbandingan *Moral Evaluation* Tempo dan Republika

Media Massa	<i>Moral Evaluation</i>
Tempo	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tugas seorang pemimpin adalah mengabdikan untuk rakyatnya, sehingga harus mampu cepat dan tanggap dalam mengatasi setiap permasalahan dan peristiwa yang terjadi di daerahnya. Serta mengutamakan kepentingan masyarakat sebagai acuan yang utama untuk dilakukan. Keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas yang utama dalam menentukan kebijakan. 2) Melalui sepatah atau dua patah kata saja yang memiliki makna negatif, mampu membuat seseorang kehilangan citra positif dan dicap dalam masyarakat. Bahkan bias saja sampai terjerat kasus hukum yang serius dan bisa diadili, bahkan menjadi tersangka atas kasus tersebut. 3) Pihak yang menjadi tokoh utama saat ini, bisa saja nantinya menjadi pihak figuran dan diabaikan. Untuk itu setiap tindakan yang dilakukan akan menuai hasil yang sesuai. Oleh karena itu, menjaga sikap dan memilih perilaku yang tepat memang harus dilakukan. Selain untuk menjamin hasil yang baik, hal tersebut juga bertujuan untuk turut memberikan hasil yang baik bagi orang sekitarnya. 4) Terlepas dari siapa saja yang akan menjadi pemimpin atau bahkan pengabdian untuk masyarakat. Sudah seharusnya sosok tersebut menjadikan kepentingan rakyat sebagai kepentingan yang utama. Untuk itu sudah sewajarnya untuk membawa kebaikan dan kesejahteraan kepada masyarakat yang dipimpin olehnya.
Republika	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pemerintah provinsi (pemprov) seharusnya membuat program yang mampu menggapai semua elemen masyarakat. Bahkan termasuk juga elemen masyarakat yang paling dasar atau bawah. Sehingga nantinya program yang dibuat tersebut mampu memberikan hasil yang baik bagi semua pihak. 2) Semua pihak termasuk seorang pemimpin sekalipun tidak lepas dari tanggung jawab. Untuk itu sudah sewajarnya bila seseorang harus bertanggung jawab atas tindakan yang telah dilakukannya. Apalagi bila tindakan tersebut mampu memberikan dampak yang luas di dalam masyarakat. 3) Menjadi tokoh yang penting di dalam masyarakat bukanlah sebuah hal yang mudah untuk dilakukan. Untuk itu, maka seorang tokoh yang penting di dalam masyarakat sepantasnya menjaga sikap agar mampu memberikan contoh dan menjadi tauladan yang baik bagi masyarakat. Tutar kata, perilaku, serta sikap yang akan dilakukan seharusnya lebih baik bila dipertimbangkan secara matang sebelum dipilih untuk dilakukan.

Tabel 4.4

Perbandingan *Treatment Recommendation* Tempo dan Republika

Media Massa	<i>Treatment Recommendation</i>
Tempo	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="560 568 1437 819">1) Pemerintah harus tanggap dan cepat dalam mengambil kebijakan pada peristiwa yang terjadi. Sehingga masyarakat tidak menjadi korban yang terabaikan. Ambil keputusan yang terbaik untuk mencegah sebuah peristiwa buruk terulang kembali di masa mendatang. Untuk itu langkah yang tanggap, cepat, dan efisien sangat diperlukan untuk mengatasi sebuah peristiwa yang terjadi di masyarakat. <li data-bbox="560 824 1437 1039">2) Lebih bijaksana untuk menilai sebuah peristiwa. Dengan cara memahami peristiwa tersebut secara lengkap dan mendetail. Sehingga tidak menimbulkan pemahaman yang keliru dari sebuah peristiwa. Karena jika sampai keliru memahami akan menyebabkan banyak hal yang kurang baik kedepannya, baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. <li data-bbox="560 1043 1437 1370">3) Menjadi figur publik berarti haruslah mampu berpikir secara matang dan memandang konsekuensi dari perilaku yang dilakukan. Untuk itu, karena Indonesia merupakan negara hukum. Sudah seharusnya untuk menyerahkan semua peristiwa yang dianggap melanggar hukum, untuk diproses secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti apapun hasilnya, sudah sewajarnya dihormati karena hal tersebut merupakan hasil dari proses hukum yang telah dilakukan. <li data-bbox="560 1375 1437 1697">4) Dalam memberikan keterangan atau kesaksian pada peradilan proses hukum yang sedang berjalan, harus dan mutlak bagi saksi untuk memberikan keterangan yang netral. Serta berusaha untuk seobjektif mungkin dalam memberikan keterangan. Karena apa saja keterangan yang diberikan akan mempengaruhi hasil dari proses hukum yang berjalan. Baik itu pernyataan yang meringankan maupun memberatkan kepada terdakwa, tetap utamakan untuk memberikan pernyataan yang netral. <li data-bbox="560 1702 1437 1973">5) Terlepas dari semua hal yang mempengaruhinya. Sudah menjadi kewajiban bagi pemimpin untuk membuat kebijakan yang mengutamakan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kesejahteraan masyarakat harus tetap dilakukan. Bukan hanya pada sebagian masyarakat yang mendukung saja, tetapi juga harus kepada semua elemen masyarakat. Karena masyarakat adalah aspek utama dan tujuan utama dari kebijakan yang dibuat serta diterapkan oleh pemimpin.

Republika	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah haruslah mampu menjangkau segala elemen yang ada di dalam masyarakat. Setiap elemen yang ada di dalam masyarakat harus bisa merasakan manfaat dari dibuatnya sebuah kebijakan tersebut. Segala elemen sampai elemen yang paling mendasar dalam masyarakat juga dipikirkan dalam membuat kebijakan. Karena sekarang ini, tidak jarang kebijakan dari pemerintah dibuat hanya untuk kepentingan segelintir elemen bahkan golongan saja. Sehingga manfaatnya tidak bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Oleh karena itu sudah sepantasnya dalam membuat kebijakan juga harus melihat semua elemen masyarakat yang ada, sampai elemen masyarakat yang paling mendasar. Tujuannya adalah agar manfaat dari kebijakan tersebut bisa membawa kebaikan bagi seluruh elemen yang ada dan masyarakat secara luas. 2) Sebuah peristiwa yang terjadi bisa dipastikan akan ada sebab dan akibatnya. Oleh karena itu apa yang menjadi penyebab dari sebuah peristiwa harus bisa dipastikan, dan selanjutnya baru bagaimana menangani akibat dari peristiwa tersebut. Seperti kegaduhan politik yang terjadi di Jakarta disebabkan oleh perilaku Ahok yang melakukan penistaan agama. Hal ini menjadi wajar jika Ahok harus bertanggung jawab atas tindakannya, dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Karena secara tidak langsung tindakan yang dilakukan oleh Ahok telah merugikan banyak pihak, serta membuat pihak-pihak saling berselisih. 3) Kebiasaan Ahok untuk berbicara secara spontan mengenai hal apa yang terlintas dibenaknya adalah hal yang riskan untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan Ahok sebagai sosok seorang pemimpin tentu harus berpikir secara matang sebelum melontarkan sebuah pernyataan. Memang bagus jika berbicara secara apa adanya dan benar, namun tentu saja harus dibarengi dengan pemikiran efek seperti apa yang bisa saja dibawa oleh pernyataan tersebut. Serta bagaimana sudut pandang yang lain dalam menangkap pernyataan tersebut juga harus dipikirkan. Karena sebagai sosok yang penting tentu saja pernyataan yang dilontarkan akan mendapatkan respon yang beragam dari banyak pihak. Respon yang diberikan pun sudah pasti akan beragam, mulai dari yang pro terhadap pernyataan tersebut sampai pada yang kontra bahkan menganggap pernyataan tersebut merendahkan dan bermasalah. Untuk itu sudah seharusnya sebagai sosok yang penting, untuk lebih berpikir matang sebelum memberikan pernyataan. Bukan hanya sebatas pernyataan hasil dari pemikiran yang spontan yang terlintas saja.
-----------	---

Dalam mengangkat pemberitaan Tempo dan Republika tidak hanya menampilkan seberapa penting dari topik permasalahan tersebut, akan tetapi juga menampilkan argumentasi-argumentasi yang dapat memberikan cara pandang masyarakat itu sendiri kepada pemberitaan. Artinya, secara tidak langsung Tempo dan Republika berusaha memberikan berita berkaitan dengan sikap dari media tersebut kepada khalayak. Sehingga khalayak dapat memiliki sudut pandang tersendiri terhadap kasus tersebut. Tempo dan Republika juga berusaha untuk mengkonstruksikan pandangan kedua media tersebut kepada khalayak sehingga memunculkan opini publik.

Dari beberapa aspek diatas tersebut, dapat dilihat bahwa Tempo dan Republika menunjukkan bahwa media cenderung mengarahkan pembaca terhadap isu-isu politis tersebut. Pengarahan terhadap pembaca bukan saja pada tingkat untuk memikirkan berita tersebut, akan tetapi sampai pada taraf bagaimana media tersebut berusaha memberikan argumentasi terhadap berita yang ditampilkan. Dapat diartikan bahwa Tempo dan Republika sudah dalam taraf mengkonstruksi realitas di dalam pemberitaan tersebut.